

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN/RAHASIA KELURAHAN PALMERIAM KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

N O	NAMA/KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI/PENTINGNYA BAGI PUBLIK	
				JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP
1	Informasi data bantuan sosial dan data keluarga miskin	Peratufan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Data Penersma Bantuan Sosial	Tidak terbatas kecuali ada ijin dan Instansi terkait	Tidak terjaga pnvasi dan keamanan individu Terjadinya stigmas sosial. terjadi penipuan dan penyalahgunaan mengancam	Menjaga pnvasi dan keamanan Individu , menghindari stigma sosial, mencegah penipuan dan penyalahgunaan, meniaga
2	Informasi mengenai korban kekerasan atau pecehan dan kekerasan dalam rumah langga (KDRT) meliputi identitas korban kekerasan. pelecehan atau eksploitas	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap informasi mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga harus dirahastakan"	Tidak terbatas kecuali ada Izin dari Instansi Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran Privasi - Dampak Psikologts yang sangat buruk bagl korban - Kekhawatiran Keamanan • Stigma Sosial oleh masyarakat - Hambatan Hukum - Konsekuensi Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Pnvasi korban Terjaga - Mendukung pemulihan Psikologis bagi korban ■ Keamanan korban dan keluarga - Menjaga Stigma Sosial - Mempermudah proses Hukum - Tidak tegadi Konsekuensi Hukum
3	Perencanaan dan pelaksanaan Keuangan dan Anggaran Kelurahan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (2) "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan azas keterbukaan, kemandirian, dan tanggung jawab, serla kerahasiaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan" Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 28 ayat (1) "Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara	Tidak terbatas kecuali ada bin dari Instansi Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan perencanaan pembangunan di Kelurahan yang tidak berkelanjutan dan tidak memberikan manfaat maksimai bagi masyarakat dan dapat menimbulkan - Potensi Penyalagunaan Dana - Gangguan Program Pembangunan - Hitangnya Kepercayaan Masyarakat - Kerugian Keuangan - Gangguan Keamanan - Penghambatan Proses Perencanaan • Potensi Pelanggaran Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah Pelanggaran Informasi Pribadi - Mencegah Informasi Rincian Rekening Bank yang hanya boleh diketahui oleh instansi tertentu - Mendukung Perencanaan Keuangan yang bersifat rencana strategis wilayah - Menghindari Penyalahgunaan Infromasi - Mencegah Persaingan Tidak Sehat saat pelaksanaan anggaran - Menjamm Efisiensi Pengelolaan Keuangan - Membangun Keuangan Strategis
4	Surat Ahli Wans	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf g	Tslak Terbatas	Jika dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentk yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau waslat	Jika ditutup melmdungi data pribadi
5	Akte Pendirian Bangunan	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf f	Tidak Terbatas	Jika dibuka dapat disalahgunakan	Jika ditutup dapat mehndungi data pribadi
6	Identitas ASN	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap informasi mengenai korban kekerasan dalam rumah langga harus dirahasiakan"	<ul style="list-style-type: none"> - Privasi Korban Terjaga - Mendukung pemulihan Psikologis bagi Korban - Keamanan Korban dan keluarga - Menjaga Stigma Sosial - Mempermudah proses Hukum - Tidak tegadi Konsekuensi Hukum 	Jika ditutup mehndungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO	NAMA/KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PENTINGNYA BAGI PUBLIK	
				JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP
7	Penilaian ASN (Dokumen)	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf 1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (2) "Asas kerahasiaan dan ketertutupan berdasarkan azas keterbukaan, kemandirian, dan tanggung jawab, serta kerahasiaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undangan" Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 28 ayat (1) "Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan secara tertutup." Peraluran Menteri Dalam Negeri	Mencegah Pelanggaran Informasi - Mencegah Informasi Rincian - Mendukung Perencanaan Keuangan yang bersifat rencana strategis wilayah - Menghmdan Penyalahgunaan Informasi - Mencegah Persaingan Tidak Sehat saat pelaksanaan anggaran - Menjamin Efisiensi Pengelolaan Keuangan - Membangun Keunggulan Strategis - Menjamin Proyek Strategis	Jika ditutup melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
8	Informasi (erkait persandian (Username, Password, dan lain-lain))	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan masyarakat	Mencegah turunnya kepercayaan masyarakat	Jika ditutup melindungi kepercayaan masyarakat
9	Rincian HPS	Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	5 Tahun

Jakarta, 28 Juli 2023
Lurah Kelurahan Palmeriam



Setiyawan, Spd
NIP. 197603201998031001